

ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA

Deni Fitriani¹⁾, Endang Masitoh²⁾, Purnama Siddi³⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: Fitrianideni335@gmail.com

²⁾Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: endangmasitoh1962@gmail.com

³⁾Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: purnamasiddi.1104@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of Government Accounting Standards (SAP), Regional Financial Accounting Systems (SAKD), Government Internal Control Systems (SPIP), and HR competencies on the quality of financial reports. This study uses a type of research with a quantitative approach, where the instrument uses a questionnaire. The research sample was 58 respondents. The data analysis method used in this research is multiple linear regression for testing the research hypothesis. The results of the study prove that Government Accounting Standards (SAP) and HR competencies have no influence on the quality of financial reports. Meanwhile, the Regional Financial Accounting System (SAKD) and the Government's Internal Control System (SPIP) have an influence on the quality of financial reports. The amount of variability that can be explained by the independent variable on the quality of financial statements is 37.5%, meanwhile, the remaining 62.5% is influenced by other variables not included in this research model.

Keywords : *Government Accounting Standards (SAP), Regional Financial Accounting System (SAKD), Government Internal Control System (SPIP), HR competence and quality of financial reports.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah telah diberikan otonomi daerah yang sifatnya luas agar pemerintah daerah bisa memberikan peningkatan secara efektif, efisien, dan akuntabilitas sehingga diharapkan bisa mencapai *good governance*. Dengan disahkannya UU RI No 6 Tahun 2014, pemberian kesempatan pada pemerintahan desa dalam mengurus sebuah tata pemerintahan secara sendiri dan juga melakukan suatu pembangunan di desa, serta mengelola keuangan agar kesejahteraan warga dan kualitas hidup di desa mendapatkan peningkatan.

Pemerintah wajib membuat susunan rencana yang baik letaknya bertujuan agar pelayanan masyarakat berkualitas, hingga hal itu dapat mempengaruhi kinerja organisasi yang kompetitif dan produktif. Menurut PP No 71 Tahun 2010, laporan yang membahas mengenai keuangan dan juga berbagai transaksi yang dilangsungkan oleh seorang individu disebut dengan Laporan Keuangan

Selaras dengan pengembangan akuntansi di sektor publik negara Indonesia, yang mana suatu kebutuhan

dari laporan keuangan itu diperlukan dengan adanya pertanggung jawaban dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Laporan dari keuangan adalah hal yang signifikan guna memahami suatu hasil tujuan yang ingin dicapai pada pemerintahan di satu periode atau tahun (Putri & Agustiawan, 2020).

PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa patokan akuntansi suatu pemerintahan menyesuaikan laporan suatu keuangan yang sudah dikumpulkan serta disajikan. Penyusunan laporan dari keuangan diharuskan untuk berpedoman atau bertumpu pada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah agar isinya bermakna, dan bermanfaat (*useful*). Yang menjadi penentu untuk penggunaan laporan keuangan tersebut dilihat dari informasi yang ditampilkan (Bastian, dalam Putri & Agustiawan, 2020).

Acuan untuk menentukan suatu laporan keuangan didapatkan dari PP No 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan akan memiliki kualitas yang baik jika memenuhi syarat karakteristik kualitatif yang ada dalam SAP. Ukuran normative yang harus dibuat dalam sebuah informasi suatu akuntansi serta dapat mencapai

apa yang dituju disebut dengan karakteristik kualitatif. Karakteristik dari kualitatif suatu laporan keuangan menurut PP No 71 Tahun 2010 terkait SAP ialah andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Berbagai permasalahan akan terjadi jika suatu laporan keuangan tidak memenuhi standar karakteristik seperti contohnya kerugian suatu daerah, adanya potensi kurang dalam penerimaan daerah, administrasi yang melemah, serta tidak hemat, efisien, dan efektif.

Menurut Pebriani (2019) SAP didefinisikan sebagai prinsip suatu akuntansi yang dipakai pemerintah daerah pada saat mengatur, dan menyajikan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kualitas LKPD Indonesia. Standar akuntansi dicapai dengan upaya yang dilakukan oleh semua entitas pelapor termasuk pemerintah daerah, untuk melaksanakan kegiatan selama periode pelaporan dengan alasan akuntabilitas, pengendalian, transparansi, serta keseimbangan antara pembangkitan dan evaluasi kerja mendapatkan hasil yang sistematis dan terstruktur. Penggunaan SAP yang tepat dan pemahaman yang menyeluruh tentang akuntansi keuangan daerah dari manajer perbendaharaan organisasi peralatan daerah (OPD) akan memastikan bahwa kualitas dari laporan keuangan ditingkatkan serta berisi informasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramita & Dharma (2018), Anggriawan & Yudianto (2018), Darmawan (2019), Putri dan Agustiawan (2020), Mulyati, *et al.* (2020), serta Zulvia, *et al.* (2020) mengemukakan bahwa kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah akan berdampak pada SAP. Namun peneliti selanjutnya dari Pebriani (2019), Pratiwi & Wahyundaru (2020) penerapan SAP tidak berpengaruh secara signifikan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 21 Tahun 2011) ialah sebuah prosedur yang dimulai dengan proses mengumpulkan data, mencatat, mengikhtisarkan, sampai melaporkan keuangan, yang dilakukan untuk suatu pertanggung jawaban anggaran pendapatan & belanja daerah. Sistem organisasi yang memberikan fasilitas terhadap jalannya laporan kinerja pemerintah daerah disebut dengan SAKD. Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 yang menjelaskan terkait panduan dalam mengelola keuangan daerah, dimana pencatatan tersebut menggunakan sistem pencatatan double entry, untuk mendapatkan penyusunan neraca di perlukan sistem (*appropriate recording*) untuk mendapatkan pencatatan yang akurat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Agustiawan (2020), Laitera, dkk. (2021), serta Pratiwi

& Wahyundaru (2020) yaitu sistem dari akuntansi keuangan suatu daerah memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan Suhardjo (2019) menunjukkan jika SAKD tidak memberikan pengaruh pada variabel kualitas LKPD.

PP No 60 Tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan jika capaian SPIP ialah untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan pemerintah dengan efektif dan efisien, sebagai pelindung untuk laporan keuangan, barang yang dimiliki pemerintah dan juga suatu peraturan perundang-undangan. Menggunakan suatu sistem yang bisa mengendalikan secara internal yang baik juga dapat meminimalisir suatu resiko kesalahan pada saat penyusunan laporan dan akan menghasilkan laporan yang baik. Sistem pengendalian tersebut juga harus dirancang dengan baik dan sesuai dengan bagian dan fungsinya agar dapat dipakai dengan baik. Dengan pengoptimalan SPIP kemungkinan proses internal akan lebih baik dan efisien hingga dapat menyelesaikan dan mengatasi perselisihan kualitas LKPD yang rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan & Yudianto (2018), Martini (2018), Darmawan (2019), Suhardjo (2019), Pratiwi dan Wahyundaru (2020), serta Laitera, dkk. (2021) yakni sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif.

Hal selanjutnya yang memengaruhi kualitas suatu laporan keuangan yakni kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia). Kemampuan dari SDM mempunyai peran pada hasil laporan keuangan yang mempunyai kualitas baik. Kurang dan rendahnya keahlian seorang individu, maka memberikan dampak pada kualitas dari laporan tersebut, bisa terjadi kekeliruan saat proses penyusunan (Agung dan Gayatri, 2018). SDM tidak akan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efektif, efisien, dan ekonomis jika memang tidak mempunyai keahlian. Penghematan waktu juga bisa dilakukan jika SDM mempunyai kompetensi yang baik. Dikarenakan SDM tersebut sudah mempunyai pemahaman dan juga pengetahuan terkait hal apa saja yang harus ia lakukan, maka laporan tersebut bisa selesai tepat waktu.

Penelitian Martini (2018), Pebriani (2019), Zulvia, *et al.* (2020), Bawono, *et al.* (2021), serta Laitera, dkk. (2021) yakni kompetensi SDM memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan, sedangkan Suhardjo (2019), serta Pratiwi dan Wahyundaru (2020) menunjukkan kompetensi SDM tidak memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menyatakan terdapat perbedaan hasil penelitian (*inconsistency result*) untuk semua variable yang diperkirakan akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kemudian, peneliti tertarik untuk mempelajari kualitas pelaporan keuangan sector public sebab pejabat pemerintah terus menyalahgunakan kebijakan dan kekuasaan. Penelitian ini ialah pengembangan suatu model dari berbagai penelitian sebelumnya, dan juga mengasah lagi *factor-factor* yang memberi dampak kepada kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Faktor yang diuji yakni; Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD,) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Keahlian SDM dengan objek penelitian adalah Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Laweyan, Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai yaitu kuantitatif, dimana analisis pada data angka yang kemudian diuji dengan statistic memakai *software* SPSS. Menurut Sugiyono, 2017 sesuatu yang dipilih peneliti sesuai dengan kebutuhan pada penelitian disebut variabel. Variable merupakan sebuah sesuatu yang terdapat berbagai macam nilai. Variable *dependent* ialah variable yang terikat yang hasilnya berpengaruh dengan variable *independent*. Kemudian, variabel *independent* yaitu variabel yang memberi pengaruh positif dan maupun negatif. Adapun variable *dependent* ialah Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dan variabel *independent* (X) terdiri atas; SIP (X₁), SAKD (X₂), SPIP (X₃), Kompetensi SDM (X₄). Pengukuran variabel memakai skala likert dengan 5 pilihan jawaban.

Perangkat Desa yang di Kecamatan Laweyan, Surakarta merupakan populasi yang dipakai. Perangkat Desa yang diteliti terdiri dari 11 kelurahan yang terdiri dari 11 kelurahan. Sampel yang dipakai ialah bagian populasi Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Laweyan, Surakarta yang berjumlah 77 orang, yang didalam nya terdapat secretariat desa (sekdes), kepala seksi (kasi), kepala urusan (kaur) dari 11 kelurahan. Untuk mengambil sampel, memakai *non probability sampling*. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh (total sampling), teknik dalam penentuan sampel dimana anggota populasi dipakai menjadi sampel (Sugiyono, 2017).

Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner pada responden. Pernyataan kuisisioner yang diberikan ini menyangkut tentang fakta dan pendapat reesponden, kuesioner bersifat tertutup, responden diminta untuk jawab pernyataan tersebut dengan memilih dari jumlah alternatif.

Analisa data yang dipakai ialah analisa data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur variable harus mencukupi berapa syarat-syarat guna mendapatkan hasil data yang akurat pada pengukuran variable dalam penelitian. Adapun pengujian yang digunakan ialah :

- Uji validitas dipakai sebagai pengukur kuesioner sah atau tidaknya. Pengujian dilakukan dengan Pearson *Correlation* yakni menguji korelasi antar item pertanyaan (Ghozali, 2018). Kriterianya ialah jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (taraf signifikansi 5 %), maka item kuesioner valid, tetapi jika sebaliknya apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka item kuesioner tidak valid.
- Uji reliabilitas, jika instrumen konsisten muncul hasil yang sama setiap dilakukan uji scale maka data reliable atau terpercay (Ghozali, 2018). Cronbach's alpha dipakai untuk mengukur. Konstruk reliabel jika Cronbach Alpha > 0.60 . atau lebih besar dari 0.60.
- Uji normalitas dipakai untuk menguji ada dalam model regresi, variabel residu mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji Kolmogorov-Smirnov ialah yang dipakai untuk mengukur. Syarat Uji normalitas, jika $p\text{-value (Asymp.Sig.)} > 0,05$ maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya.
- Uji multikolinearitas untuk menemuka adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dengan cara menganalisa matriks *correlation* ataupun dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* hasil dari analisa regresi.
- Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan mengetahui model regresi terdapat tidakselarasan *variance* residual pada pengamatan satu ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Sejatinnya bisa dideteksi melalui uji Glejser hal ini untuk menguji tingkat signifikansi regresi dari nilai absolute residual. Jika tingkat signifikan berada diatas 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya.
- Analisis regresi linier berganda dipakai untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dengan pengukuran interval (Ghozali, 2018). Berikut model regresi yang digunakan yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Laporan Keuangan
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_n$	= Koefisien regresi

X1	= Standar Akuntansi Pemerintah
X2	= Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah	
X3	= Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah	
X4	= Kompetensi SDM
e	= Standard error

- g. Uji ketepatan model (Uji F) ialah uji yang dipakai untuk melihat variabel mempunyai pengaruh secara bersama atau tidak (Ghozali, 2018). Membandingkan pada kriteria ialah cara uji jika ninya. Jika $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ berarti model goodness of fit. Dan sebaliknya.
- h. Uji hipotesis bertujuan mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh signifikan antar variabel. Yang digunakan adalah uji t. Adapun kriteria pengujian Uji t adalah jika nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ atau nilai sig. $> 0,05$ hipotesis ditolak, artinya *independent variable* tidak berdampak terhadap *dependent Variable*. Dan sebaliknya.
- i. Koefisien Determinasi (R^2) yakni pengukuran berapa jauh skill model memiliki penjelasan pada variabel *dependent*. Nilai daripada koefisien determinasi ialah 0 (nol) dan 1 (satu). Ghozali (2018) menjelaskan bahwa keahlian variabel *independent* saat menerangkan variable *dependent* terbatas sekali dimana terdapat kecilnya nilai R^2 . Begitupun sebaliknya, bila nilai R^2 mendekati angka 1 (satu) maka variable-variabel *independent* dapat menyampaikan sebagian dari informasi yang diinginkan bertujuan memperkirakan *dependent variable*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1 Uji Validitas

Pada variabel kualitas keuangan, SAP, SAKD, SPIP, dan Kompetensi SDM seluruh item pernyataan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,254) dengan signifikansi $< \alpha$ (0,05).

3.1.2 Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian yang dipakai reliabel, karena *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Dikatakan reliabel karena hasil α hitung $>$ batas kriteria, yaitu 0,60 sehingga semua item pernyataan dapat dipergunakan.

3.1.3 Uji Normalitas.

Tabel 1

Model	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
<i>Unstandardized Residual</i>	0,779	0,579

Dari uji tersebut nilai dari Kolmogorov-Smirnov Z ada di angka 0,779 dengan nilai signifikan 0,579. Hal itu memiliki makna normalnya nilai resiudu yang sudah dihasilkan. Sehingga model tersebut layak atau bisa digunakan

untuk memberikan prediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel *dependent*.

3.1.4 Uji multikolinearitas

Tabel 2

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
(X ₁)	0,863	1,159	Bebas Multikol
(X ₂)	0,658	1,519	Bebas Multikol
(X ₃)	0,672	1,488	Bebas Multikol
(X ₄)	0,781	1,281	Bebas Multikol

Berdasarkan tabel 2 diatas Hasil dari seluruh variabel *independent* dalam penelitian mempunyai *score tolerance* $> 0,10$ serta angka VIF < 10 , yang mana tidak ditemukan korelasi antara variabel bebas. Artinya variabel-variabel *independent* pada penelitian tidak terdapat multikolinearitas.

3.1.5 Uji heteroskedastisitas

Tabel 3

Variabel	p-value	Keterangan
(X ₁)	0,137	Bebas Hetero
(X ₂)	0,711	Bebas Hetero
(X ₃)	0,188	Bebas Hetero
(X ₄)	0,131	Bebas Hetero

Dapat dilihat dari table 3 diatas hasil uji heteroskedastisitas semua variable mendapatkan nilai signifika $> 0,05$. Maka varian masuk pada data homogen atau bebas uji heteroskedastisitas. Sehingga secara menyeluruh dapat diartikan bahwa tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas terhadap penelitian ini.

3.1.6 Regresi Linier Berganda

$$Y = 7,706 - 0,073X_1 + 0,232X_2 + 0,477X_3 - 0,118X_4 + 5,126$$

Dilihat dari hasil persamaan regresi linier berganda, membuktikan pengaruh antara variabel. Penjelasan regresi akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini :

Terdapat nilai di angka 7,706 dan parameter yang positif. Hal tersebut menyatakan bahwa apabila SAP, SAKD, SPIP, serta Kompetensi SDM dianggap konstan (sama dengan nol), hingga kualitas laporan keuangan meningkat.

Pada koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintah terdapat nilai di angka 0,073 dan parameter yang negatif. Hal tersebut membuktikan bahwa

penurunan Standar Akuntansi Pemerintah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, mengakibatkan penurunan kualitas laporan keuangan.

Koef regresi SAKD di angka 0,232 dan parameter yang positif. Hal tersebut membuktikan peningkatan yang terjadi pada SAKD berdasarkan landasan variabel lain, secara terus-menerus akan meningkatkan kualitas pada laporan keuangan.

Terdapat nilai Koefisien regresi sebesar 0,477 pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan parameter positif. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi terhadap SPIP, asumsinya variabel lain yakni konstan, sehingga dapat membuat kualitas laporan keuangan meningkat.

Kemudian, pada Koefisien regresi kompetensi SDM terdapat nilai sebesar 0,118 dengan parameter negatif. Artinya, setiap terjadi penurunan terhadap kompetensi SDM, asumsinya variabel lain yakni konstan, sehingga dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

3.1.7 Uji ketepatan model (Uji F)

Tabel 4

F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
9,556	2,54	0,000	Model Fit

Berdasarkan tabel diatas nilai uji hipotesis simultan didapatkan hasil Fhitung dengan score 9,556 > Ftabel yaitu 2,54 dan taraf signifikansi 0,000 < $\alpha=0,05$. Hal ini menunjukkan model regresinya layak digunakan untuk memprediksi, sehingga SAP, SAKD, SPIP, dan Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikansi secara bersama atau simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Atau bisa dimaknai juga bahwa uji regresi yang dipakai sudah model fit atau sesuai

3.1.8 Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 5

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
(X ₁)	-0,931	2,005	0,356	H ₁ Ditolak
(X ₂)	2,827	2,005	0,007	H ₂ Diterima
(X ₃)	3,280	2,005	0,002	H ₃ Diterima
(X ₄)	-0,874	2,005	0,386	H ₄ Ditolak

3.1.9 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 6

R Square	Adjusted R Square	Keterangan
0,419	0,375	Variabilitas variabel 37,5%

Berdasarkan hasil analisa pada table 6 diatas didapatkan nilai R² Square di angka 0,375. Memiliki arti variabel *independent* penelitian ini dimana terdiri dari SAP, SAKD, SPIP, dan Kompetensi SDM dapat

memberi penjelasan variabilitas dari variabel kualitas laporan keuangan yakni berjumlah 37,5%. Sementara itu, sisanya 62,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya tidak dimasukkan.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dilihat dari analisis data yang sudah dilaksanakan, diketahui SAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dapat diartikan penerapan yang kurang baik dari SAP, sehingga kualitas laporan yang dihasilkanpun kurang. Jika segala transaksi yang sudah dilaporkan sesuai dengan standar yang sudah berlaku, maka laporanpun akan terjamin kualitasnya. Hal tersebut konsisten oleh penelitian Pebriani (2019), Pratiwi & Wahyundaru (2020) yakni tidak terdapat pengaruh antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pemda.

Berbeda dengan Pramita & Dharma (2018), Anggriawan & Yudianto (2018), Darmawan (2019), Putri dan Agustiawan (2020), Muliati, et al. (2020), serta Zulvia, et al. (2020) yakni menerapkan SAP memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemda.

3.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis data, diketahui SAKD memberi pengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan. Dapat diartikan bagus atau baiknya penerapan S.AKD, kualitas laporanpun akan bagus atau baik. Jika penerapan SAKD dari awal dilakukan dengan sesuai standar, laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki hasil yang baik dan bebas dari kesalahan saji materi, dan orang-orang yang memakai pun tidak tersesatkan. Sesuai oleh penelitian Putri & Agustiawan (2020), Laitera, dkk. (2021), serta Pratiwi & Wahyundaru (2020) yakni SAKD memberi pengaruh pada kualitas suatu laporan keuangan pemda. Berbeda dengan Suhardjo (2019) yakni menunjukkan SAKD tidak memberi pengaruh pada variabel kualitas LKPD.

3.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa SPIP memiliki pengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan. Dapat diartikan lengkapnya dan menyeluruhnya pelaksanaan SPIP sudah dilaksanakan terhadap sistem dari akuntansi memberi pengaruh pada proses pembuatan laporan keuangan. Dengan baiknya laporan keuangan, penerapan SPI pun pasti baik pula. Terciptanya suatu sistem yang berkualitas disebabkan oleh struktur dari pengendalian yang memadai sehingga

mencegah suatu kesalahan dan menghasilkan suatu keandalan. Sesuai oleh peneliti Anggriawan & Yudianto (2018), Martini (2018), Darmawan (2019), Suhardjo (2019), Pratiwi dan Wahyundaru (2020), serta Laitera, dkk. (2021) yakni SIP memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2.4 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Melalui analisis data yang dilakukan, diketahui tidak adanya pengaruh yang dimiliki kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Menunjukkan kondisi SDM yang tidak mencukupi dan tidak memenuhi aturan pada standar kesesuaian penulisan laporan keuangan. Maka kompetensi SDM belum tentu dapat menerapkan proses antara tanggungjawab dan tugas yang dijalani oleh atasan dengan sebaik mungkin, oleh karena itu dapat terjadinya perbuatan yang menggandakan tugas satu pegawai ke pegawai lain nya. Kemudian hasil daripada penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan Suhardjo (2010), serta Pratiwi dan Wahyundaru (2020) mengemukakan bahwa kompetensi SDM tidak ada pengaruh dengan kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan yang ditunjukkan dari Martini (2018), Pebriani (2019), Zulvia, et al. (2020), Bawono, et al. (2021), serta Laitera, dkk. (2021) yakni kompetensi SDM memiliki pengaruh kualitas laporan keuangan.

4. KESIMPULAN

Tujuan dilakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh SAP, SAKD, SPIP, dan kompetensi SDM terhadap kualitas dari laporan keuangan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Laweyan Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh SAP, SAKD, SPIP, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan, kesimpulan yang didapat yakni :

- a. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan SAP tidak memberi pengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan.
- b. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan SAKD memberi pengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan.
- c. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan SPIP tidak memberi pengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan.
- d. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan Kompetensi SDM tidak memberi efek pengaruh pada kualitas dari laporan keuangan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh kontribusi yang telah membantu penelitian ini sampai dengan output berupa terpublikasinya ke jurnal ilmiah ini.

REFERENSI

- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2): 1253-1276.
- Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. (2018). Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1): 30-42.
- Bawono, I. R., Suroso, A., & Yuniarso, G. P. (2021). Assessing Effect of The Factors that Influence Financial Reporting Information Quality. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2): 107-116.
- Darmawan, E. (2019). The Effect of Government Accounting Standards and Government Internal Control Systems on the Quality of Local Government Financial Statements. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 01(02): 108 – 111.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS SPSS 20*. Semarang: ISBN UNDIP.
- Laitera, F., Ahuluheluw, N. & Laitupa, M. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya). *Kupna Jurnal*, 1(2): 74-80.
- Martini, N.P.R. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Akuntansi pada Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2): 50-62.
- Muliyati, D., Amir, A. M., Zahra, F., Ridwan, Yamin, N. Y., Pakkawaru, M. I., & Masruddin. (2020). The Effect of the Adoption of Government Accounting Standards, Apparatus Competence and Accounting Information System on the Quality of Local Government Financial Reports. *Advances in*

Economics, Business and Management Research, 163: 323-326.

Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. 10(1): 55-62.

Pramita, I.I.G.A.A., & Dharma, S.I.D.G. (2018). Effect of Application of Good Governance, Government Accounting Standards and Apparatus on Quality of Financial Statements. *RJOAS*, 6(78):355-362.

Pratiwi, I. A., & Wahyundaru, S. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3: 194-215.

Putri, N. R. & Agustiawan. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar). *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*. 1(2):100-109.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suhardjo, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*. 17(4): 1-22.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Zulvia, D., Martha, L., Magdalena, M., Zusmawati, & Fernos, J. (2020). The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards, Internal Audit and Human Resources Quality on the Quality of Financial Statements in the City of Padang Regional Government Institution. *International Journal of Economic and Business Applied*, 1(2): 135-146

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-6-tahun-2014-tentang-otonomi-daerah/UU-227-262-UU_No._6_Tahun_2014_Pemerintahan_Daerah.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/postpp-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--232-267-PP56_2005.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Thn2008SPIP.pdf>.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/postpp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintah/--232-267-PP71_2010.pdf.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://keuda.kemendagri.go.id/produk hukum/download/.../permendagri-no-13-tahun-2006.pdf>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. <http://keuda.kemendagri.go.id/produk hukum/download/180/permendagri-no-21-tahun-2011>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah. <http://keuda.kemendagri.go.id/produk hukum/download/.../permendagri-no-59-tahun-2007.pdf>

Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. 2013. Jakarta: Kepala Badan Kepegawaian Negara.